



2023

RENJA

DINAS KESEHATAN

Email : diskeskota.palu@gmail.com

Website : dinkes.palukota.go.id



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Jalan Balai Kota Utara No. 4 Palu
Telp/Fax (0451) 457080-457079

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR : 440/180-09/DISKES/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah Pasal 11 ayat 3.a.
bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan Kota Palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Palu No 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Kesehatan Kota Palu ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026;
 - b. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023;
 - c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023;
 - d. menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu
pada tanggal : Mei 2022

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



MHAM, S.Kep., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19651011 198802 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU
NOMOR :
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2023

1. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Palu
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 3. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 5. Kasubbag Keuangan dan Aset
 6. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
 7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
 8. Kepala Seksi Gizi
 9. Kepala Seksi Promosi Kesehatan
 10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
 12. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan
 14. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 15. Kepala Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan
 16. Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman
 17. Kepala Seksi Sarana dan Alat Kesehatan
 18. Kepala Seksi Hukum dan SDM Kesehatan
 19. Staf Subbag Perencanaan Program



**PI. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**

ILHAM, S.Kep.,M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19651011 198802 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan yang disyaratkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kota Palu menggambarkan tentang pelaksanaan Program Kesehatan baik itu pelaksanaan program pokok maupun program penunjang. Dalam dokumen ini juga ditampilkan berbagai data hasil pencapaian kinerja di bidang kesehatan selama beberapa tahun terakhir dan juga perkiraan target capaian kinerja untuk beberapa tahun ke depan.

Dalam penyusunan dokumen ini disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam penyajian data dan analisisnya. Oleh karena itu segala bentuk saran dan tanggapan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kota Palu di masa yang akan datang.

Tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segala bentuk pemikiran dan tenaga dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023. Mudah-mudahan dengan adanya dokumen ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian program di bidang kesehatan.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|----|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar Isi | | ii |
| Daftar Tabel | | iv |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II | EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 | |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan | 7 |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan | 20 |
| 2.3 | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu | 27 |
| 2.4 | Review terhadap Rancangan Awal | 29 |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 41 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN | |
| 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 44 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja | 47 |
| 3.3 | Program dan Kegiatan | 48 |

| | | |
|--------|--|----|
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN | |
| | 4.1 Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan | 60 |
| BAB V | PENUTUP | 63 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----------------------|--|-------|----|
| Tabel 2.1 (T-C.29) | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu s/d Tahun 2022 | | 8 |
| Tabel 2.2 (T-C.30) | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu | | 24 |
| Tabel 2.3 (T-C.31) | Review terhadap Rancangan Awal Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 | | 31 |
| Tabel 2.4 (T-C.32) | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan di Kota Palu Tahun 2023 | | 42 |
| Tabel 3.1 (T-C.33) | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 | | 53 |
| Tabel 4.1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Tahun 2023 | | 61 |
| Tabel 4.2 | Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu | | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-4 (2020-2024), pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang telah hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam RPJMN 2020-2024, strategi RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 yang ingin dicapai ada 5 yaitu : (1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat; (3) Peningkatan pengendalian penyakit; (4) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas); (5) Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Dinas Kesehatan Kota Palu adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Dinas Kesehatan Kota Palu juga memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Musrenbang Kota Palu;
20. Peraturan Daerah Kota Palu No 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Palu No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041;
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Walikota Palu No.9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Walikota Palu No.19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kerangka pendanaan, pagu indikatif dan prakiraan maju yang akan menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan 2022 serta perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan Tahun 2024;
2. Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja Tahun 2023;
3. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
5. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tetap berpedoman pada RKPD Tahun 2023, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Palu

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

- 4.1 Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2022

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan telah ditetapkan beberapa indikator kinerja baik itu indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci untuk menilai kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu yang bisa dilihat dari evaluasi pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra diharapkan dapat mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Dalam upaya mengarahkan pelaksanaan seluruh rencana kegiatan maka kegiatan evaluasi harus direalisasikan dengan mekanisme dan durasi waktu yang sesuai kebutuhan pengembangan program.

Namun karena pada saat penyusunan Renja 2023 kegiatan 2022 masih sementara berjalan maka kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (Tahun 2022 belum bisa ditelaah, maka kami mengevaluasi anggaran Tahun 2021) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 terdapat 5 (lima) program yang terbagi menjadi 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 93 (sembilan puluh tiga) sub kegiatan. Evaluasi pencapaian kinerja meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan yang mencakup. Evaluasi pelaksanaan Renja s.d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 (T-C.29) berikut ini:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KESEHATAN KOTA PALU S/D TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 1 | 02 | KESEHATAN | | | | |
| | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | |
| | 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 100,0 |
| | 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen (Renja) | 1 Dokumen (Renja) | 1 100,0 |
| | 01 2.01 02 | Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen (RKA, DPA) | 2 Dokumen (RKA, DPA) | 2 100,0 |
| | 01 2.01 03 | Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen (RKA, DPA) | 2 Dokumen (RKA, DPA) | 2 100,0 |
| | 01 2.01 06 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Dokumen (LAKIP, LPPD, LKPJ, TEPR, DAK) | 5 Dokumen (LAKIP, LPPD, LKPJ, TEPR, DAK) | 5 100,0 |
| | 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya evaluasi Kinerja Program SPM bid Kesehatan dan pertemuan Dinas-Puskesmas | 2 Dokumen (Lap.SPM, Laporan tahunan) | 2 Dokumen (Lap.SPM, Laporan tahunan) | 2 100,0 |
| | 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 100,0 |
| | 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan Tunjangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 100,0 |
| | 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terwujudnya tata Kelola Keuangan yang transparan dan Akuntabel | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 100,0 |
| | 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Penyusunan Dokumentasi laporan Keuangan | 1 Dokumen laporan keuangan | 1 Dokumen laporan keuangan | 1 100,0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 2.02 05 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun OPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 | 100,0 |
| 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Penyusunan Dokumentasi bahan tanggapan pemeriksaan | 1 1 dokumen | 1 1 dokumen | 1 | 100,0 |
| 01 2.02 07 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Terlaksananya hasil laporan keuangan Bulanan/ semester | 4 Triwulan pelaporan | 4 Triwulan pelaporan | 4 | 100,0 |
| 01 2.02 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen laporan prognosis | 1 Dokumen laporan prognosis | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 04 | Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 | 100,0 |
| 01 1.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 100 % | 100 | #DIV/0! |
| 01 2.03 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 | 100,0 |
| 01 2.03 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | 6 item | 6 item | 6 | 100,0 |
| 01 2.03 02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor | 1 dinas | 1 dinas | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan rumah tangga | 1 dinas | 1 dinas | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor | 1 tahun | 1 tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan | 1 paket | 1 paket | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 6 media/jasa media | 6 media/jasa media | 6 | 100,0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 2.03 07 | Penyediaan Bahan/Material | Terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material | 1 tahun | 1 tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 tahun | 1 tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 09 | Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah | 37 OK | 37 OK | 37 | 100,0 |
| 01 2.03 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 100 | 100,0 |
| 01 2.03 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah | 4 / 3 Ambulance / R-2 | 6 Ambulance Kelurahan | 6 | 0,0 |
| 01 2.03 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 100 | 100,0 |
| 01 2.03 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 | 100,0 |
| 01 2.03 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 204 Unit (Service Komputer/Laptop/Printer/ | 210 Unit (Service Komputer/Laptop/Printer | 210 | 102,9 |
| 01 2.03 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 | 100,0 |
| 01 2.03 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 tahun | 1 tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 tahun | 1 tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 tahun | 1 tahun | 1 | 100,0 |
| 01 2.03 09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0,0 |
| 01 2.03 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 100 % | 100 % | 100 | 100,0 |
| | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------|----|----|------|----|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA | Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah | Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembangunan Puskesmas | Pembangunan Puskesmas | 1 Puskesmas | | 0 | 0,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pengembangan Pustu menjadi Puskesmas | 1 Paket | | 0 | 0,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | 0 | #DIV/0! |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas | Pengembangan Puskesmas menjadi Klinik Modern | 4 Puskesmas | 8 Puskesmas | 8 | 200,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pengembangan Pustu menjadi Puskesmas | | | 0 | #DIV/0! |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas | 3 Puskesmas | 3 Puskesmas | 3 | 100,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes. | | 1 Pustu | 1 | #DIV/0! |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 8 Unit | | 0 | 0,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Mobiler, Komputer,Laptop, Printer AC dan Saranana pendukung lainnya pada fasilitas Pelayanan Kesehatan | 14 Unit Komputer, Printer | 4 Unit Kulkas | 4 | 28,6 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan IPAL dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1 Puskesmas | 4 Puskesmas | 4 | 400,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang Medik Fasilitas Peayanan Kesehatan | 1 Paket | 1 Paket | 1 | 100,00 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 1 Paket | 1 Paket | 1 | 100,00 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Tersedianya obat untuk masyarakat Kota Palu | 1 Paket | 1 Paket | 1 | 100,0 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah BMHP yang diadakan | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 02 02 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu hamil | 7.770 bumil | 7.770 bumil | 7770 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu bersalin dan melahirkan di Faskes | 7.416 bulin | 7.416 bulin | 7416 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi | 6.837 bayi | 6.837 bayi | 6837 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Cakupan pelayanan kesehatan pada balita | 45.158 balita | 45.158 balita | 45158 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Cakupan pelayanan kesehatan seluruh pada usia sekolah pendidikan dasar yang dijangkau di sekolah | 41.744 murid | 41.744 murid | 41744 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-49 tahun) | 250.384 jiwa | 250.384 jiwa | 250384 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Cakupan pelayanan kesehatan lansia yang diskriminasi | 27.468 jiwa | 27.468 jiwa | 27468 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi | 28.239 jiwa | 28.239 jiwa | 28239 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi | 9.137 jiwa | 9.137 jiwa | 9137 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita ODGJ Berat | 723 kasus | 723 kasus | 723 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB | Presentasi prevalensi orang dengan terduga tuberkulosis | 14.895 jiwa | 14.895 jiwa | 14895 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Terdeteksinya Orang yang berisiko HIV | 6.538 kasus | 6.538 kasus | 6538 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB | Terlindunginya masyarakat dari KLB | 46 Kelurahan | 46 Kelurahan | 46 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat | Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan | 46 Kelurahan | 46 Kelurahan | 46 | 100,0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 02 02 2.02 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Penanganan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan ibu hamil KEK | 40, 550, Gibur, Gikur, bumil KEK 500 | 40, 550, Gibur, Gikur, bumil KEK 500 | 40, 550, 500 | #VALUE! |
| 01 02 02 2.02 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Terwujudnya Tes Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji | 750 orang | 750 orang | 750 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pertemuan Pertemuan Deklarasi STBM, Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas | 4 kali | 4 kali | 4 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan | Persentase Informasi kesehatan yang dapat tersebar luas di semua kalangan masyarakat | 46 Kelurahan | 46 Kelurahan | 46 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional | Survei Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional | 70 Batra | 70 Batra | 70 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Pemantauan kondisi dan determinan kesehatan masyarakat | 46 Kelurahan | 46 Kelurahan | 46 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza. | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Menurunnya Cakupan Penderita Kesehatan Khusus | 12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja | 12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja | 12 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit menular dan tidak menular | | | | |
| 01 02 02 2.02 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya | 70.000 jiwa Jamkesda | 70.000 jiwa Jamkesda | 70000 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Pemeriksaan Tes Urine (Napza) | 15 Sekolah | 15 Sekolah | 15 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit | 8 Kasus | 8 Kasus | 8 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 29 | Penyelenggaraan Kota Sehat | Terlaksananya kegiatan Pertemuan Penguatan Forum Kota /Kab. Sehat (KKS) | 46 , 8 Kelurahan, Kecamatan | 46 , 8 Kelurahan, Kecamatan | 46 , 8 | #VALUE! |
| 01 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Tercapainya Pelayanan Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 02 02 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Presentasi Layanan Kesehatan Rujukan yang Sesuai Standar | 10 RS | 10 RS | 10 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota | Terlaksananya akreditasi Puskesmas | 2 Puskesmas | 2 Puskesmas | 2 | 100,0 |
| 01 02 02 2.02 36 | Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian | Persentase penanganan kejadian yang tidak diharapkan | 7.500 siswa | 7.500 siswa | 7500 | 100,0 |
| 01 02 02 2.03 38 | Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Tersedianya Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | |
| 01 02 02 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota | Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan | 15 Dinas, Puskesmas | 15 Dinas, Puskesmas | 15 | 100,0 |
| 01 02 02 2.03 01 | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan | Terlaksananya Penyusunan Profil Kesehatan sebagai pendukung Sistem Informasi bidang kesehatan | 45 Buku Profil Kesehatan, Puskesmas, Lap | 45 Buku Profil Kesehatan, Puskesmas, Lap | 45 | 100,0 |
| 01 02 02 2.03 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Peningkatan sistem informasi kesehatan & pengelolaan website dinas | 12 Bulan biaya pengelolaan website | 12 Bulan biaya pengelolaan website | 12 | 100,0 |
| 01 02 02 2.03 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Tersedianya perangkat sistem informasi yang mendukung penguatan Sistem Informasi kesehatan | 1 Perangkat Komputer & Jaringannya | 1 Perangkat Komputer & Jaringannya | 1 | 100,0 |
| 01 02 02 2.04 | Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota | Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan | 10 RS | 13 RS | 13 | 130,0 |
| 01 02 02 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D | Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring | 13 RS | 13 RS | 13 | 100,0 |
| 01 02 02 2.04 02 | Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Meningkatkan Pengetahuan SDM tentang Sistem Rujukan Terintegrasi & meningkatnya Mutu Pelayanan | 13 RS | 13 RS | 13 | 100,0 |
| 01 02 02 2.04 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | 66 Fasilitas Kesehatan | 66 Fasilitas Kesehatan | 66 | 100,0 |
| 01 02 02 2.04 04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Meningkatkan Mutu Pelayanan Rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas | 24 RS, Puskesmas | 24 RS, Puskesmas | 24 | 100,0 |
| | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Terlaksananya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100 % | 100 % | 100 | 100,00 |
| 01 02 03 2.01 | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | 256 Sarana Praktek Swasta | 256 Sarana Praktek Swasta | 256 | 100,0 |
| 01 02 03 2.01 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga | Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tindak lanjut perizinan | 256 Sarana Praktek Swasta | 256 Sarana Praktek Swasta | 256 | 100,0 |
| 01 02 03 2.03 | Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di | Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan | 27 Puskesmas, RS | 27 Puskesmas, RS | 27 | 100,0 |
| 01 02 03 2.03 01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan | 27 Puskesmas, RS | 27 Puskesmas, RS | 27 | 100,0 |
| 01 02 03 2.03 02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tindak lanjut perizinan | 27 Puskesmas, RS | 27 Puskesmas, RS | 27 | 100,0 |
| 01 02 03 2.04 | Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100 nakes | 100 nakes | 100 | 100,00 |
| 01 02 03 2.04 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 nakes | 100 nakes | 100 | 100,00 |
| 01 02 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 | 100,00 |
| 01 02 04 2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT | 332 apotek, toko obat, batra | 314 apotek, toko obat, batra | 314 | 94,58 |
| 01 02 04 2.01 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan | 332 apotek, toko obat, batra | 314 apotek, toko obat, batra | 314 | 94,58 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 02 04 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT | 265 PIRT | 265 PIRT | 265 | 100,00 |
| 01 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produksi Makanan | Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan | 265 PIRT | 265 PIRT | 265 | 100,00 |
| 01 02 04 2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM | 1.348 TPM | 1.225 TPM | 1225 | 90,9 |
| 01 02 04 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum | Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sehingga Terbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) | 1.225 TPM | 1.225 TPM | 1225 | 100,0 |
| 01 02 04 2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan | 1.600 Stiker | 1.500 Stiker | 1500 | 93,8 |
| 01 02 04 2.05 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan | 1.600 tempat jajanan makanan | 1.500 tempat jajanan makanan | 1500 | 93,8 |
| 01 02 04 2.06 | Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | 135 sarana PIRT | 135 sarana PIRT | 135 | 100,0 |
| 01 02 04 2.06 01 | Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Terlaksananya pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 135 sarana PIRT | 135 sarana PIRT | 135 | 100,0 |
| | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2023 | Target Program dan Kegiatan (RENJA Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun berjalan | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10=(9) | 11=(10/4) |
| 01 02 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | 100 % | 100 % | 100 | 100,00 |
| 01 02 05 2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan | Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,00 |
| 01 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan | Kegiatan Advokasi dalam Pengembangan Strata Posyandu | 14 Puskesmas | 14 Puskesmas | 14 | 100,00 |
| 01 02 05 2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS | 46 Kelurahan | 28 Sekolah | 28 | 60,87 |
| 01 02 05 2.02 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Pelaksanaan kegiatan Hidup Bersih dan Sehat | 46 Kelurahan | 28 Sekolah | 28 | 60,87 |
| 01 02 05 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota | Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM | 276 Posyandu, Poskesdes | 276 Posyandu, Poskesdes | 276 | 100,00 |
| 01 02 05 2.03 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber | Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan | 276 Posyandu, Poskesdes | 276 Posyandu, Poskesdes | 276 | 100,00 |
| | | | | | | |

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa target kinerja program/kegiatan bidang kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 sangat beragam dan semuanya menuntut pencapaian kinerja 100%, terutama yang terkait 53 program unggulan Wali Kota Palu yaitu :

1. Palu Kota Sehat

Tahun 2021

- Mengingat pandemi covid-19, **persiapan kota sehat hanya sebatas pertemuan tim pembina kota sehat yang beranggotakan dari lintas sektor** (bappeda kota palu, dinas pendidikan, dinas perumahan permukiman, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dinas sosial, dinas pu, dinas koperasi umkm, dinas pariwisata, dinas pemuda olahraga, dinas pengendalian penduduk & kb, 8 kecamatan)
- **Terkait penanganan gizi**, berhasil menurunkan prevalensi wasting, underweight & stunting :
 - Prevalensi bblr turun dari 3% (2020) menjadi 2,6% (2021)
 - Prevalensi wasting turun dari 6,6% (2020) menjadi 3,9% (2021)
 - Prevalensi underweight turun dari 11,6% (2020) menjadi 6,7% (2021)
 - Prevalensi stunting turun dari 14% (2020) menjadi 7,9% (2021)
- **Terkait penanganan kesehatan ibu/anak/balita**, berhasil menekan angka kematian :
 - Angka kematian ibu (aki) sebesar 96/100.000 kh dari target nasional 205/100.000 kh
 - Angka kematian bayi (akb) sebesar 0,1/100.000 kh dari target nasional 20/1.000 kh

- Angka kematian balita (akba) sebesar 0,1/1.000 kh dari target nasional 32/1.000 kh

Tahun 2022

- Baru tahap pelaksanaan kota sehat untuk mendapatkan penilaian **tatanan kota sehat swastisaba wistara.**

Kota Palu di Tahun 2013 mendapatkan predikat kota sehat swastisaba wiwerda.

Bulan Juni & 2022 dilaksanakan pertemuan tim forum kota sehat yang beranggotakan dari lintas sektor (bappeda kota palu, dinas pendidikan, dinas perumahan permukiman, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dinas sosial, dinas pu, dinas koperasi umkm, dinas pariwisata, dinas pemuda olahraga, dinas pengendalian penduduk & kb, 8 kecamatan)

- **Kegiatan mendukung pencapaian kota sehat :**
 - Pemicuan dan deklarasi stbm
 - Pengawasan air bersih & air minum
- **Terkait penanganan gizi**, berhasil menurunkan prevalensi wasting, underweight & stunting :
 - Target prevalensi BBLR 3,8%
 - Target prevalensi wasting 7,5%
 - Target prevalensi underweight 14%
 - Target prevalensi stunting 17,4%
- **Terkait penanganan kesehatan ibu/anak/balita**, menurunkan angka kematian di kota palu :
 - Target nasional angka kematian ibu (AKI) 182/100.000 KH
 - Target nasional angka kematian bayi (AKB) sebesar 12/1.000 KH
 - Target nasional angka kematian balita (AKBa) sebesar 19/1.000 KH

2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern

Tahun 2021

- Karena pandemi covid-19, **pelayanan puskesmas sore hari & rawat inap tidak dapat dilaksanakan**

Tahun 2022

- Karena peningkatan kasus covid-19, **pelayanan puskesmas sore hari & rawat inap tutup selama bulan maret s/d april.**

Tahun 2023

- Mengusulkan menyediakan tenaga 4 dokter spesialis (anak, penyakit dalam, bedah & kandungan) di Puskesmas
- Konsultasi dokter bisa melalui aplikasi telemedicine

3. Satu Ambulance Satu Kelurahan

Tahun 2021

- Pengadaan 7 unit ambulance dan sudah distribusikan ke kelurahan

Tahun 2022

- Usulan pengadaan 5 unit ambulance melalui dana ABT

4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu

Tahun 2021

- Belanja iuran jaminan kesehatan (BPJS Kelas 3) untuk 66.000 jiwa masyarakat miskin

Tahun 2022

- Belanja iuran jaminan kesehatan (BPJS Kelas 3) dialokasikan untuk 70.000 jiwa masyarakat miskin

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu juga terdapat di dalam kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selama Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Palu mengukur dan mengevaluasi kinerja program sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam Permenkes yang baru, Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKK) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah terbagi atas beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, parameter umum yang mencakup bidang Kesehatan termasuk ke dalam golongan aspek kesejahteraan sosial dengan indikator yang diukur yaitu:

- 1) Angka Harapan Hidup
- 2) Prevalensi balita gizi buruk

2. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, parameter umum yang mencakup bidang Kesehatan termasuk ke dalam pelayanan dasar dengan indikator yang diukur yaitu:

- 1) Angka kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
- 2) Angka kelangsungan hidup bayi
- 3) Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
- 4) Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
- 5) Angka kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup
- 6) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
- 7) Rasio Dokter per satuan penduduk
- 8) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- 9) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- 10) Cakupan Desa/Kelurahan UCI

- 11) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
- 12) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
- 13) Cakupan balita pneumonia yang ditangani
- 14) Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
- 15) Penderita Diare yang ditangani
- 16) Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- 17) Cakupan kunjungan bayi
- 18) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
- 19) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
- 20) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB penyelidikan epid <24 jam
- 21) Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
- 22) Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
- 23) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 24) Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- 25) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 26) Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 27) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 28) Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 29) Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 30) Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan
- 31) Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
- 32) Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Kesehatan dari Tahun 2021 s/d Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C.30) berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKU / IKK | Target RENSTRA Tahun.... | | | Realisasi Capaian Tahun.... | Proyeksi Tahun.... | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|-----------|--------------------------|------|------|-----------------------------|--------------------|------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022*) | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 50,05 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 50,30 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 51,79 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 44,34 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 34,05 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 2,48 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 45,19 | 100 | 100 | |
| 8 | Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 9,23 | 100 | 100 | |
| 9 | Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 11,72 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 43,18 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 25,66 | 100 | 100 | |
| 12 | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | SPM | IKK | 100 | 100 | 100 | 32,29 | 100 | 100 | |
| 13 | Prevalensi balita Stunting | | IKU | 21 | 18 | 16 | 7,00 | 18 | 16 | |
| 14 | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa | | IKU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | Prevalensi balita gizi buruk | | IKK | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,111 | 0,48 | 0,46 | |

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKU / IKK | Target RENSTRA Tahun.... | | | Realisasi Capaian Tahun.... | Proyeksi Tahun.... | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022*) | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Angka kelangsungan hidup bayi | | IKK | 0,9986 | 0,9980 | 0,9975 | 0,9954 | 0,9980 | 0,9975 | |
| 17 | Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup | | IKK | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 0,14 | 2,22 | 2,21 | |
| 18 | Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup | | IKK | 2,01 | 2,00 | 1,99 | 0,99 | 2,00 | 1,99 | |
| 19 | Angka kematian Ibu per-1.000 Kelahiran Hidup | | IKK | 191,80 | 121,0 | 111,0 | 0 | 121,0 | 111,0 | |
| 20 | Rasio Puskesmas per satuan penduduk penduduk (/1.000 pddk) | | IKK | 3,8 | 3,9 | 4,0 | | 3,9 | 4,0 | |
| 21 | Rasio Dokter per satuan penduduk (/1.000 pddk) | | IKK | 0,9901 | 0,995 | 1,011 | 0,618 | 99,50 | 101,50 | |
| 22 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | | IKK | 100 | 100 | 100 | 59,31 | 100 | 100 | |
| 23 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | | IKK | 97,50 | 100 | 100 | 50,06 | 100 | 100 | |
| 24 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | | IKK | 96,33 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
| 25 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 26 | AFP rate (/100.000 pddk <15 th) | | IKK | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 27 | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | | IKK | 100 | 100 | 100 | 28,72 | 100 | 100 | |
| 28 | Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD | | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 29 | Penderita Diare yang ditangani | | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | Cakupan kunjungan bayi | | IKK | 100 | 100 | 100 | 51,24 | 100 | 100 | |
| 31 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | | IKK | 95 | 100 | 100 | 39,37 | 100 | 100 | |
| 32 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | | IKK | 100 | 100 | 100 | 57,22 | 100 | 100 | |
| 33 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | | IKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu

Sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Palu dalam penyelenggaraannya mengacu kepada dasar-dasar Pembangunan Kesehatan yaitu: (1) Perikemanusiaan; (2) Pemberdayaan dan Kemandirian; (3) Adil dan Merata, serta (4) Pengutamaan dan Manfaat. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan untuk mencapai tujuan yaitu Kota Sehat Untuk Semua, suatu kondisi dimana sehat bukan milik dari sekelompok orang melainkan milik dari seluruh masyarakat di Kota Palu.

Berdasarkan hasil analisis dan kecenderungan pembangunan kesehatan di Kota Palu masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dan di masa periode yang akan datang yang akan mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan yang melingkupi urusan kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| 1 | Indeks Pelayanan Kesehatan yang bermutu belum mencapai target | Belum maksimalnya pelayanan kesehatan | Penempatan tenaga kesehatan yang belum merata. |
| | | | Belum memadainya penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan |
| | | | Minimnya tenaga medis (dokter spesialis) |
| 2. | Derajat kesehatan masih belum mencapai target | Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit | Masih tingginya Angka kematian Ibu, bayi dan balita |
| | | | Masih Tingginya angka <i>Stunting</i> |
| | | | Masih tingginya kasus penyakit menular (TB, HIV dan DBD) dan tidak menular (HT, DM dan ODGJ) |
| | | Penjaminan kesehatan masyarakat miskin belum seluruhnya tercover | Meningkatnya kasus covid-19 |
| | | | Keterbatasan pendanaan penjaminan kesehatan melalui dana APBD |

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kesehatan dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Isu Strategis | | | |
|-----|--|---|---|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional | Lain-lain |
| 1. | Sustainable Development Goals (SDGs) 2030; - Tujuan keberhasilan SDGs selama 15 tahun ke depan tidak berbeda jauh dengan MDGs yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. | Upaya akselerasi kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator SDGs - <i>Primary Health Care</i> yang efektif akan dapat mengatasi meningkatnya beban penyakit tidak menular, kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan diet tidak sehat.. | Penguatan kegiatan yang memberikan daya ungkit kepada pencapaian indikator SDGs; - Melakukan akselerasi kegiatan dalam rangka pencapaian indikator SDGs, meliputi: 1) Penurunan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk; 2) Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita; 3) Pemberian Imunisasi Campak pada Bayi; 4) Penurunan Angka Kematian Ibu; 5) Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan; 6) Penurunan Prevalensi HIV-AIDS; 7) Penurunan Prevalensi Penyakit Malaria; 8) Peningkatan CDR dan Cure Rate penderita TB; 9) Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak; 10) Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak. | |
| | | | Belum tercapainya beberapa indikator derajat kesehatan | |
| | | | - Angka kematian ibu di Kota Palu masih berfluktuasi tingginya meskipun pernah berada dibawah target nasional dan SDGs. - Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang dapat dilihat dengan masih rendahnya angka D/S (parameter Posyandu). - Masih adanya kasus gizi buruk, wasting dan juga stunting di masyarakat | |

| No. | Isu Strategis | | | |
|-----|---|--|--|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional | Lain-lain |
| 2. | Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016; - Pemberlakuan ASEAN Community akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus merupakan tantangan tersendiri terutama berkaitan dengan meningkatnya daya saing dari fasilitas penyedia layanan kesehatan serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. | Upaya peningkatan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri; - Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya. - | Upaya peningkatan mutu layanan dan sumber daya manusia kesehatan; - Melakukan standarisasi pelayanan pada fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan dengan penerapan ISO, GKM, dan akreditasi Puskesmas serta - Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petugas kesehatan secara berkesinambungan. | |

Sesuai dengan amanat Kepala Daerah, bahwa Program unggulan yang terkait bidang kesehatan tidak bisa terlepas dari Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka *Stunting*.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan

Hal ini sejalan dengan program Kesehatan yang ada dalam 53 program unggulan Wali Kota Palu seperti yang telah diuraikan pencapaian dan targetnya di atas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Rancangan awal suatu rencana kerja merupakan point penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan Renja itu sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk

tahun yang direncanakan sebagai acuan dalam menyiapkan rancangan Renja. Rancangan awal berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Di dalam penyusunan rancangan awal dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dari usulan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian RKP, dan analisis isu strategis.

Adapun rancangan awal program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C.31) berikut:

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2023

OPD : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|-------------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Palu | Nilai SAKIP OPD | B | 68.705.841.102 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Palu | Nilai SAKIP OPD | B | 62.354.159.256 | |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Palu | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 dokumen | 357.847.606 | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Palu | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 dokumen | 385.004.500 | |
| | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Palu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 47.743.770 | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Palu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 42.205.900 | |
| | 2. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Palu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 209.541.247 | 2. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Palu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 dokumen | 221.501.300 | |
| | 3. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Palu | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 30.696.508 | 3. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Palu | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 dokumen | 40.993.300 | |
| | 4. Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Palu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan | 13.087.222 | 4. Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Palu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 16.454.150 | |
| | 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Palu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 56.778.859 | 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Palu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 63.849.850 | |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Palu | Persentase realisasi keuangan | 100% | 59.595.534.480 | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Palu | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 53.097.571.956 | |
| | 1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Palu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.099 orang/bulan | 59.581.687.329 | 1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Palu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.099 Orang | 53.067.819.406 | GAJI/TPP |
| | 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Palu | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 4.746.969 | 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Palu | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dokumen | 14.875.050 | |
| | 5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Palu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.284.768 | 5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Palu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 3.309.950 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------|---|----------------|----------------------|--|-------------|--|----------------|----------------------|----------------------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Palu | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 dokumen | 2.406.298 | 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | |
| | 7. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Palu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4 laporan | 3.242.426 | 7. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Palu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 8.920.000 | |
| | 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Palu | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1.166.690 | 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Palu | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen | 2.647.550 | |
| | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Palu | Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 1.677.117 | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Palu | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 6.360.000 | |
| | 1. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD | Palu | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.677.117 | 1. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD | Palu | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 6.360.000 | |
| | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Palu | Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 18.103.138 | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Palu | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 18.620.000 | |
| | 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Palu | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 dokumen | 18.103.138 | 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Palu | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 18.620.000 | |
| | 2. Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan | | | | | 2. Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan | | | | | |
| | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Palu | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 429.638.222 | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Palu | Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 464.577.950 | |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Palu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1.884.496 | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Palu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1.938.300 | |
| | 2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Palu | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 42.487.248 | 2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Palu | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 7.304.900 | |
| | 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Palu | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 16.759.456 | 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Palu | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 35.777.200 | |
| | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Palu | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 10.412.707 | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Palu | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 81.668.050 | |
| | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Palu | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 53.109.911 | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Palu | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 25.380.000 | |
| | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan | Palu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 2.430.604 | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan | Palu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.500.000 | |
| | 7. Penyediaan Bahan/Material | | | | | 7. Penyediaan Bahan/Material | | | | | pindah ke sub keg bahan logistik |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu | Palu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 3.675.073 | 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu | Palu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 2.037.500 | |
| | 9. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Palu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 laporan | 298.878.726 | 9. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Palu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan | 307.972.000 | |
| | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Palu | Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah | | - | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Palu | Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | - | |
| | 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | |
| | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | pindah ke sub keg Penyediaan Prasarana penunjang Faskes |
| | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Palu | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 6.671.119.013 | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Palu | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 6.917.805.850 | |
| | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Palu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 843.474.252 | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Palu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 867.556.250 | |
| | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Palu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Palu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 5.827.644.760 | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Palu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 6.050.249.600 | |
| | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Palu | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 1.631.921.527 | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Palu | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 1.464.219.000 | |
| | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Palu | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 483.374.204 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Palu | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 426.900.000 | |
| | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | Palu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 338 unit | 1.131.482.540 | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | Palu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 338 Unit | 1.011.569.000 | |
| | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Palu | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 48 unit | 7.777.933 | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Palu | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 68 unit | 8.500.000 | |
| | 4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Palu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 96 unit | 9.286.851 | 4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Palu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 57 unit | 17.250.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|---|----------------|----------------------|--|--------|---|---|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Palu | Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat | 100% | 59.052.067.124 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Palu | Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat | 100% | 54.485.757.618 | |
| 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Palu | Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 10.580.034.522 | 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Palu | Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 10.294.811.779 | |
| | 1. Pembangunan Puskesmas | Palu | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 1 unit | 426.753.285 | 1. Pembangunan Puskesmas | | | | | |
| | 4. Pengembangan Puskesmas | Palu | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 7 unit | 540.566.314 | 4. Pengembangan Puskesmas | | | | | |
| | 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Palu | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 3 unit | 470.564.921 | 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | |
| | 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Palu | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 8 unit | 295.632.387 | 6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | |
| | 7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Palu | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 7 unit | 1.020.853.650 | 7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | |
| | 9. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Palu | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 10 unit | 631.957.022 | 9. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Palu | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 6 IPAL, 2 Incinerator, 10 Ambulance, 3 solar cell | 1.505.000.000 | DAK FISIK, APBD |
| | 10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Palu | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 449 unit | 5.137.739.149 | 10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Palu | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 5 paket | 3.127.719.111 | DAK FISIK, APBD |
| | 11. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Palu | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (RMC) | 369 unit | 171.114.517 | 11. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Palu | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (RMC) | 1 paket | 208.807.000 | DAK NON FISIK |
| | 12. Pengadaan Obat, Vaksin | Palu | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | 1 paket | 1.786.581.644 | 12. Pengadaan Obat, Vaksin | Palu | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | 1 paket | 4.639.785.668 | DAK FISIK, APBD |
| | 13. Pengadaan Bahan Habis Pakai | Palu | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 1 paket | 98.271.633 | 13. Pengadaan Bahan Habis Pakai | Palu | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 3 Paket | 813.500.000 | DAK FISIK |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------|--|---------------------|-----------------------|--|-------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 48.260.209.065 | 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 44.074.341.129 | |
| | 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Palu | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 8.547 orang | 477.552.907 | 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Palu | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 8.547 bumil | 626.127.500 | DAK Non Fisik, APBD |
| | 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Palu | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 8.158 orang | 78.684.483 | 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Palu | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 8.158 bulin | 24.931.100 | DAK Non Fisik |
| | 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Palu | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7.521 orang | 81.765.516 | 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Palu | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7.521 bayi | 26.475.000 | DAK Non Fisik |
| | 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Palu | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 49.674 orang | 18.083.693 | 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Palu | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 49.674 balita | 9.849.900 | DAK Non Fisik |
| | 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Palu | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 45.918 orang | 330.810.178 | 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Palu | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 45.918 murid | 191.735.100 | DAK Non Fisik |
| | 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Palu | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 275.422 orang | 32.327.032 | 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Palu | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 275.422 jiwa | 16.625.000 | |
| | 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Palu | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 29.115 orang | 776.310.589 | 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Palu | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 29.115 jiwa | 733.724.850 | Kenaikan Honor Kader |
| | 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Palu | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 31.063 orang | 13.611.382 | 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Palu | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 31.063 jiwa | 14.000.000 | |
| | 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Palu | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10.051 orang | 413.154 | 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Palu | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10.051 jiwa | 320.320.000 | |
| | 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Palu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 795 orang | 1.008.701 | 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Palu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 795 kasus | 736.250 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB | Palu | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 16.385 orang | 113.898.100 | 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB | Palu | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 16.385 jiwa | 37.350.000 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV | Palu | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 7.192 orang | 21.061.183 | 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV | Palu | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 7.192 kasus | 8.612.000 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 dokumen | 2.000.238.281 | 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 46 Kelurahan | 324.500.000 | APBD, DAK Non Fisik |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|---|----------------|----------------------|---|--------|---|--|----------------------|---------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 dokumen | 2.916.725 | 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 46 Kelurahan | 3.000.000 | |
| | 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 dokumen | 851.871.551 | 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Palu | Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 45 Gibur, 550 Gikur, 550 bumil KEK | 812.116.150 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 dokumen | 3.694.518 | 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 1.025.150 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 2.595.885 | 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 869.850 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 4.818.672 | 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan | Palu | Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 46 lap Kel | 1.668.850 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 dokumen | 9.953.323 | 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | 6.324.850 | |
| | 20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 dokumen | 6.623.396 | 20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 2 Dokumen | 6.812.350 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Palu | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 150 orang | 814.252 | 21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Palu | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 150 Orang | 0 | |
| | 22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Palu | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 14 Puskesmas | 1.701.423 | 22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Palu | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 25 orang | 1.750.000 | |
| | 23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 1 dokumen | 949.945.521 | 23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Palu | Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari | 1.185.742.350 | |
| | 24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 dokumen | 508.786.168 | 24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9 Dokumen Penyakit | 522.532.350 | |
| | 25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 dokumen | 32.422.488.000 | 25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Palu | Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat | 70.000 jiwa Jamkesda | 29.276.727.304 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|-----------------------|----------------------|--|--------|--|---|----------------------|---------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Palu | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 450 orang | 3.645.906 | 26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Palu | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) dan Sekolah | 15 Sekolah | 1.875.000 | |
| | 27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Palu | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 1 paket | 12.881.763 | 27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Palu | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 11 Kasus | 4.894.400 | |
| | 28. Penyelenggaraan Kota Sehat | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 dokumen | 18.667.038 | 28. Penyelenggaraan Kota Sehat | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | 15.600.100 | |
| | 29. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayana Kesehatan | Palu | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk | 11 unit | 1.871.565.026 | 29. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Palu | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan | 11 Unit | 0 | |
| | 30. Operasional Pelayanan Puskesmas | Palu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 dokumen | 7.305.083.004 | 30. Operasional Pelayanan Puskesmas | Palu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 9.734.029.825 | DAK Non Fisik |
| | 31. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Palu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 dokumen | 1.154.537 | 31. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Palu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 13 Dokumen | 4.587.550 | |
| | 32. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota | Palu | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 2 unit | 280.769.755 | 32. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota | Palu | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 7 Puskesmas | 122.960.950 | DAK Non Fisik |
| | 33. Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Palu | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 laporan | 10.646.045 | 33. Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Palu | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10 Laporan | 3.374.850 | APBD, DAK Non Fisik |
| | 35. Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Palu | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 unit | 43.821.358 | 35. Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Palu | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 13 RS, 14 PKM | 33.462.550 | |
| | 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota | Palu | Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 204.825.829 | 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota | Palu | Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 106.119.460 | |
| | 1. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 45 dokumen | 45.686.314 | 1. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap Tahunan Pustu | 57.979.210 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|---|-------------|--|----------------------------------|----------------------|---|-------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 2 dokumen | 22.053.453 | 2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen Komdat | 39.610.250 | |
| | 3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Palu | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan | 2 unit | 137.086.062 | 3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Palu | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan | 1 Paket (Jaringan Lantai 2) | 8.530.000 | |
| | 4. Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota | Palu | Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan | 10 RS | 6.997.709 | 4. Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota | Palu | Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan | 13 RS | 10.485.250 | |
| | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D | Palu | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 10 RS | 2.379.561 | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D | Palu | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 13 RS | 4.985.150 | |
| | 2. Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 10 RS | 2.199.697 | 2. Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 13 RS | 1.887.550 | |
| | 3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Palu | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 13 unit | 2.418.451 | 3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Palu | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 13 RS | 3.612.550 | |
| | C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Palu | Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan | 100% | 194.584.428 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Palu | Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan | 100% | 149.389.000 | |
| | 1. Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | Palu | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | 256 Sarana Praktek Swasta | 2.250.739 | 1. Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | Palu | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | 256 Sarana Praktek Swasta | 1.264.400 | |
| | 2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 2 dokumen | 2.250.739 | 2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 2 Dokumen | 1.264.400 | |
| | 2. Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota | Palu | Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan | 14 Puskesmas, 13 RS | 1.482.668 | 2. Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota | Palu | Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan | 14 Puskesmas, 13 RS | 1.224.800 | |
| | 3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 dokumen | 1.482.668 | 3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 dokumen | 1.224.800 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|------------------|----------------------|---|--------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 3. Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 nakes | 190.851.021 | 3. Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 75 Nakes | 146.899.800 | |
| | 1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Palu | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 100 Orang | 190.851.021 | 1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Palu | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 75 Nakes | 146.899.800 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | D. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN | Palu | Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 100% | 400.303.453 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN | Palu | Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan | 100% | 410.670.300 | |
| | 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Palu | Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT | 265 PIRT | 291.404.133 | 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Palu | Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT | 172 PIRT | 299.724.000 | |
| | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 dokumen | 291.404.133 | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen PIRT | 299.724.000 | DAK Non FISIK (BPOM) |
| | 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM | 1.348 TPM | 2.588.593 | 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM | 1.348 TPM | 1.925.150 | |
| | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 dokumen | 2.588.593 | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 Dokumen | 1.925.150 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|---|-----------------|----------------------|--|--------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Palu | Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan | 1.600 stiker | 2.133.098 | 4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan | 336 stiker | 1.869.150 | |
| | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 1 dokumen | 2.133.098 | 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 1 Dokumen | 1.869.150 | |
| | 5. Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | Palu | Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | 135 sarana PIRT | 104.177.629 | 5. Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | Palu | Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | 135 sarana PIRT | 107.152.000 | |
| | 1. Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Palu | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 135 unit | 104.177.629 | 1. Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Palu | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 135 sarana PIRT | 107.152.000 | DAK Non FISIK (BPOM) |
| | | | | | | | | | | | |
| | E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Palu | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100% | 2.238.397.872 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Palu | Terlaksananya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 2.739.127.050 | |
| | 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan | 100% | 3.148.847 | 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota | Palu | Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan | 100% | 3.238.900 | |
| | 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Palu | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 dokumen | 3.148.847 | 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Palu | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 Dokumen | 3.238.900 | |
| | 2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | | Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS | 100% | 42.351.159 | 2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | | Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS | 100% | 490.981.000 | |
| | 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 dokumen | 42.351.159 | 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 490.981.000 | |
| | 3. Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota | | Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM | 100% | 2.192.897.866 | 3. Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota | | Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM | 100% | 2.244.907.150 | |
| | 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 dokumen | 2.192.897.866 | 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Palu | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 2.244.907.150 | Kenaikan Honor Kader |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 130.591.193.979 | | | | | 120.139.103.224 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) adalah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kota Palu dan diadakan di setiap Kelurahan yang ada di Kota Palu. Musrenbang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah (khususnya kesehatan) dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya. Musrenbang juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Penyelenggaraan Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Forum SKPD/Gabungan SKPD Propinsi, dan Musrenbang Propinsi.

Dari hasil Musrenbang diperoleh daftar prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKP terkait. Untuk Usulan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan dari setiap Kelurahan di Kota Palu untuk tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA PALU

OPD : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN / VOLUME | CATATAN |
|-----|---|-----------------------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | | |
| | 1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kel. Buluri | - Pengadaan Mobiler untuk Posyandu (Meja 3 Buah, Kursi 8 Buah, Lemari 2 Buah) | 13 Unit | Bisa Menggunakan Dana 366 Di Kelurahan |
| | | Kel. Kayumalue Pajeko | - Pengadaan Lemari Posyandu (Tidak ada tempat atau lemari yang digunakan menyimpan barang-barang posyandu) | 3 Set | Bisa Menggunakan Dana 366 Di Kelurahan |
| | | Kel. Poboya | - Pengadaan mobileur semua posyandu | | Bisa Menggunakan Dana 366 Di Kelurahan |
| | | | - Pengadaan mobileur posyandu remaja | | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | |
| | 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kel. Pantoloan | - Pemberian Makanan Tambahan | 6 Posyandu | Terakomodir di Tahun 2022 |
| | | Kel. Birobuli Utara | - Pelayanan Penanganan gizi buruk dan gizi kurang | | Terakomodir Tahun 2022 |
| | | Kel. Mambo | - Sosialisasi Staunting dan gizi buruk (Agar masyarakat lebih mengetahui tentang staunting, gizi buruk dan bahayanya) | 50 Orang | Terakomodir Tahun 2022 |
| | 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan | Kel. Baiya | - Penyuluhan Narkoba di Lingkungan Masyarakat | 2 Kali | Terakomodir tahun 2022 |
| | | Kel. Pantoloan | | 2 Kali | |
| | | Kel.Pantoloan Boya | - Penyuluhan Kesehatan Reproduksi | 4 Kali | Terakomodir Tahun 2022 |
| | | Kel.Pantoloan Boya | - Penyuluhan Narkoba | 4 Kali | Terakomodir Tahun 2022 |
| | | Kel.Lambara | | 6 Kali | Terakomodir Tahun 2022 |
| | 3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kel. Pantoloan | - Pembuatan Kartu BPJS Masyarakat belum mempunyai BPJS | | Bisa terakomodir |
| | | Kel. Silae | - Pembuatan Kartu BPJS Masyarakat belum mempunyai BPJS | 66 Orang | Bisa terakomodir |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN / VOLUME | CATATAN |
|---|---|--------------------|--|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | |
| | 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kel. Besusu Tengah | - Pelayanan Kesehatan Terhadap Lansia (pemeriksaan gratis, sosialisasi pendampingan pemberian gigi kepada lansia, senam lansia. serta pengadaan sarana dan prasarana pada posyandu lansia) | 90 Orang | Bisa terakomodir |
| 2. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | |
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | |
| | 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kel.Pantoloan Boya | - Penyuluhan Narkoba | 4 Kali | Terakomodir Tahun 2022 |
| | | Kel.Lambara | | 6 Kali | Terakomodir Tahun 2022 |
| Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | |
| | 2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Kel. Baru | - Sosialisasi PHBS | 1 Lokasi | Terakomodir Tahun 2022 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun tetap mengikuti visi dan misi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-royong”***. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pemerintah yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, serta
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Pembangunan kesehatan di Kota Palu diselenggarakan dalam upaya mencapai Visi Kota Palu pada masa 5 (lima) tahun mendatang, mengacu kepada Dokumen RPJMD Kota Palu, yakni ***“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”***.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Kota Palu. Visi merupakan tujuh menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mengacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan

Pembangunan Kota yang melayani dan dinikmati oleh warganya bercirikan harmonis dalam keragaman.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan;
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Penentuan prioritas pembangunan Daerah juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun prioritas pembangunan jangka menengah daerah, meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
2. SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan yaitu **meningkatkan derajat kesehatan**, Dinas Kesehatan Kota Palu telah merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026, demi mencapai Misi ke-3 Pemerintah Daerah yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global Dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana Dan Covid – 19.**

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan yaitu **“Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat”** dengan sasaran **“Meningkatnya derajat kesehatan”**.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kota Palu, maka pembangunan kesehatan di Kota Palu Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;

Dengan memperhatikan analisis situasi, isu-isu strategis serta Visi dan Misi Dinas Kesehatan, maka pembangunan bidang kesehatan di Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan pada upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

3. Memberikan iuran Jaminan dan kualitas kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
5. Meningkatkan penanggulangan stunting
6. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi dan misi serta sasaran strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan jangka menengah (RPJMD), maka Dinas Kesehatan Kota Palu merumuskan sasaran serta indikator sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap tahun anggaran.

Sesuai dengan konsep RPJMD Kota Palu Tahun 2021–2026 dan juga sebagai penjabaran dari Misi Dinas Kesehatan Kota Palu, maka tujuan pembangunan kesehatan yang harus dicapai Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021–2026 adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan”**.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 dan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan selama Tahun 2023 sudah mengacu pada Nomenklatur baru yaitu Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.

2. Pencapaian SDGs point 1C, 4, 5, dan 6.
3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Palu

Terkait dengan pencapaian visi misi program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dan telah disesuaikan dengan program kegiatan yang ada dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan usulan program baru, ada 4 program kesehatan yang berkaitan dengan 53 program unggulan adalah :

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS gratis warga tidak mampu

Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 yaitu :

- a. Jumlah program yang diusulkan adalah 5 (lima) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) Sub Kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD Dinas Kesehatan dan jaringannya

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilakukan selama Tahun 2023 adalah :

Program Wajib :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP (dengan 11 Sub Kegiatan);
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 34 Sub Kegiatan);
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (dengan 3 Sub Kegiatan) ;
- 4) Penerbitan Izin Kelas C, D dan Faskes Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 3 Sub Kegiatan).

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- 1) Pemberian izin Praktek Tenaga kesehatan di Wilayah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 2) Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 3) Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan).

3. Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produksi Makanan (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 2) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 3) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Jajanan (dengan 1 Sub Kegiatan).
- 4) Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT (dengan 2 Sub Kegiatan).

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan).

Program Penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dengan 5 Sub Kegiatan);
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (dengan 8 Sub Kegiatan);
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (dengan 1 Sub Kegiatan);
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah (dengan 8 Sub Kegiatan);
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (dengan 3 Sub Kegiatan);
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (dengan 2 Sub Kegiatan).

Adapun Rekapitulasi rumusan rencana dan pendanaan program/kegiatan untuk Tahun 2023 dan juga perencanaan untuk tahun selanjutnya (Tahun 2024), selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 (T-C.33) berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 02 | KESEHATAN | Palu | | 120.139.103.224 | APBD | | | 126.146.058.385 |
| | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Palu | B | 62.354.159.256 | APBD | | B | 65.471.867.219 |
| | 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Palu | 13 Dokumen | 385.004.500 | APBD | | 13 Dokumen | 404.254.725 |
| | 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Palu | 2 dokumen | 42.205.900 | APBD | | 2 dokumen (Renja, Renstra) | 44.316.195 |
| | 01 2.01 02 | Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Palu | 2 dokumen | 221.501.300 | APBD | | 2 dokumen (RKA, DPA) | 232.576.365 |
| | 01 2.01 03 | Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Palu | 2 dokumen | 40.993.300 | APBD | | 2 dokumen (RKA, DPA) | 43.042.965 |
| | 01 2.01 06 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Palu | 5 Laporan | 16.454.150 | APBD | | 5 Laporan (LAKIP, LPPD, LKPJ, TEPRA, | 17.276.858 |
| | 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Palu | 2 Laporan | 63.849.850 | APBD | | 2 Laporan (Lap.SPM, Laporan tahunan) | 67.042.343 |
| | 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Palu | 100% | 53.097.571.956 | APBD | | 100% | 55.752.450.554 |
| | 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Palu | 1.099 Orang | 53.067.819.406 | APBD | GAJI/TPP (Dinas) | 1.099 Orang | 55.721.210.376 |
| | 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Palu | 1 dokumen | 14.875.050 | APBD | | 1 dokumen laporan keuangan | 15.618.803 |
| | 01 2.02 05 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Palu | 1 Laporan | 3.309.950 | APBD | | 1 Laporan | 3.475.448 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.2.02.07 | Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | Palu | 4 Laporan | 8.920.000 | APBD | | 4 Laporan | 9.366.000 |
| 01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Palu | 1 dokumen | 2.647.550 | APBD | | 1 dokumen laporan prognosis | 2.779.928 |
| 01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Palu | 100% | 6.360.000 | APBD | | 100% | 6.678.000 |
| 01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Palu | 1 Laporan | 6.360.000 | APBD | | 1 Laporan | 6.678.000 |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Palu | 100% | 18.620.000 | APBD | | 100% | 19.551.000 |
| 01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Palu | 1 Dokumen | 18.620.000 | APBD | | 1 Dokumen | 19.551.000 |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Palu | 100% | 464.577.950 | APBD | | 100% | 487.806.848 |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | Palu | 1 paket | 1.938.300 | APBD | | 1 paket | 2.035.215 |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Palu | 1 paket | 7.304.900 | APBD | | 1 paket | 7.670.145 |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Palu | 1 paket | 35.777.200 | APBD | | 1 paket | 37.566.060 |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | Palu | 1 paket | 81.668.050 | APBD | | 1 paket | 85.751.453 |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Palu | 1 paket | 25.380.000 | APBD | | 1 paket | 26.649.000 |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Palu | 12 Dokumen | 2.500.000 | APBD | | 12 Dokumen | 2.625.000 |
| 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Palu | 12 Laporan | 2.037.500 | APBD | | 12 Laporan | 2.139.375 |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Palu | 24 Laporan | 307.972.000 | APBD | | 24 Laporan | 323.370.600 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|---|--|--|--|--------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| | | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | Palu | 100% | 6.917.805.850 | APBD | | 100% | 7.263.696.143 |
| | | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Palu | 12 Laporan | 867.556.250 | APBD | | 12 Laporan | 910.934.063 |
| | | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Palu | 12 Laporan | 6.050.249.600 | APBD | | 12 Laporan | 6.352.762.080 |
| | | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Palu | 100% | 1.464.219.000 | APBD | | 100% | 1.537.429.950 |
| | | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | Palu | 1 Unit | 426.900.000 | APBD | | 1 Unit | 448.245.000 |
| | | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Palu | 338 Unit | 1.011.569.000 | APBD | | 338 Unit | 1.062.147.450 |
| | | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | Palu | 68 unit | 8.500.000 | APBD | | 100 | 8.925.000 |
| | | 01 | 2.03 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Palu | 57 unit | 17.250.000 | APBD | | 100 | 18.112.500 |
| 01 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat | | Palu | 100% | 54.485.757.618 | APBD | | 100% | 57.210.045.499 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP | | Palu | 14 Puskesmas | 10.294.811.779 | APBD | | 14 Puskesmas | 10.809.552.368 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | Palu | 6 IPAL, 2 Incinerator, 10 Ambulance, 3 solar cell | 1.505.000.000 | DAK FISIK, APBD | | 4 IPAL, 4 Incinerator, 20 Ambulance | 1.580.250.000 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | Palu | 5 paket | 3.127.719.111 | DAK FISIK, APBD | | 5 paket | 3.284.105.067 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas | | Palu | 1 paket | 208.807.000 | DAK NON FISIK | | 1 paket | 219.247.350 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | | Palu | 1 paket | 4.639.785.668 | DAK FISIK, APBD | | 1 paket | 4.871.774.951 |
| 01 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | | Palu | 3 Paket | 813.500.000 | DAK FISIK | | 3 Paket | 854.175.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|--------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0102022.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP | Palu | 14 Puskesmas | 44.074.341.129 | DAK Non Fisik, APBD | | 14 Puskesmas | 46.278.058.185 |
| 0102022.0201 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 8.547 bumil | 626.127.500 | DAK Non Fisik, APBD | | 8.547 bumil | 657.433.875 |
| 0102022.0202 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 8.158 bulin | 24.931.100 | DAK Non Fisik | | 8.158 bulin | 26.177.655 |
| 0102022.0203 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 7.521 bayi | 26.475.000 | DAK Non Fisik | | 7.521 bayi | 27.798.750 |
| 0102022.0204 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 49.674 balita | 9.849.900 | DAK Non Fisik | | 49.674 balita | 10.342.395 |
| 0102022.0205 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 45.918 murid | 191.735.100 | DAK Non Fisik | | 45.918 murid | 201.321.855 |
| 0102022.0206 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 275.422 jiwa | 16.625.000 | APBD | | 275.422 jiwa | 17.456.250 |
| 0102022.0207 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 29.115 jiwa | 733.724.850 | Kenaikan Honor | | 29.115 jiwa | 770.411.093 |
| 0102022.0208 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 31.063 jiwa | 14.000.000 | APBD | | 31.063 jiwa | 14.700.000 |
| 0102022.0209 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Palu | 10.051 jiwa | 320.320.000 | APBD | | 10.051 jiwa | 336.336.000 |
| 0102022.0210 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Palu | 795 kasus | 736.250 | APBD, DAK Non Fisik | | 795 kasus | 773.063 |
| 0102022.0211 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Palu | 16.385 jiwa | 37.350.000 | APBD, DAK Non Fisik | | 16.385 jiwa | 39.217.500 |
| 0102022.0212 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Palu | 7.192 kasus | 8.612.000 | APBD, DAK Non Fisik | | 7.284 kasus | 9.042.600 |
| 0102022.0213 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Palu | 46 Kelurahan | 324.500.000 | APBD, DAK Non Fisik | | 46 Kelurahan | 340.725.000 |
| 0102022.0214 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Palu | 46 Kelurahan | 3.000.000 | APBD | | 46 Kelurahan | 3.150.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|--------------|--|---|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0102022.0215 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Palu | 45 Gibur, 550 Gikur, 550 bumil KEK | 812.116.150 | APBD, DAK Non Fisik | | 55 Gibur, 600 Gikur, 500 bumil KEK | 852.721.958 |
| 0102022.0216 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Palu | 1 Dokumen | 1.025.150 | APBD, DAK Non Fisik | | 1 Dokumen | 1.076.408 |
| 0102022.0217 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Palu | 1 Dokumen | 869.850 | APBD, DAK Non Fisik | | 1 Dokumen | 913.343 |
| 0102022.0218 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan | Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Palu | 46 Kelurahan | 1.668.850 | APBD, DAK Non Fisik | | 46 Kelurahan | 1.752.293 |
| 0102022.0219 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Palu | 1 Dokumen | 6.324.850 | APBD | | 1 Dokumen | 6.641.093 |
| 0102022.0220 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Palu | 2 Dokumen | 6.812.350 | APBD, DAK Non Fisik | | 2 Dokumen | 7.152.968 |
| 0102022.0222 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Palu | 25 orang | 1.750.000 | APBD | | 25 orang | 1.837.500 |
| 0102022.0223 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Palu | 12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa | 1.185.742.350 | APBD | | 12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa | 1.245.029.468 |
| 0102022.0225 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Palu | 9 Dokumen Penyakit | 522.532.350 | DAK NON FISIK / APBD | | 9 Dokumen Penyakit | 548.658.968 |
| 0102022.0226 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat | Palu | 70.000 jiwa Jamkesda | 29.276.727.304 | JAMKESD A / NON KAPITASI | | 70.000 jiwa Jamkesda | 30.740.563.669 |
| 0102022.0227 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Palu | 15 Sekolah | 1.875.000 | APBD | | 15 Sekolah | 1.968.750 |
| 0102022.0228 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | Palu | 11 Kasus | 4.894.400 | APBD | | 11 Kasus | 5.139.120 |
| 0102022.0229 | Penyelenggaraan Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Palu | 1 Dokumen | 15.600.100 | APBD | | 1 Dokumen | 16.380.105 |
| 0102022.0233 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Palu | 1 Dokumen | 9.734.029.825 | DAK NON FISIK | | 1 Dokumen | 10.220.731.316 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------------|--|---|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 02 02 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Palu | 13 Dokumen | 4.587.550 | APBD | | 13 Dokumen | 4.816.928 |
| 01 02 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Palu | 7 Puskesmas | 122.960.950 | APBD, DAK Non Fisik | | 7 Puskesmas | 129.108.998 |
| 01 02 02 2.02 36 | Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Palu | 10 Laporan | 3.374.850 | APBD | | 10 Laporan | 3.543.593 |
| 01 02 02 2.03 38 | Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit | Palu | 13 RS, 14 PKM | 33.462.550 | APBD | | 13 RS, 14 PKM | 35.135.678 |
| 01 02 02 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota | Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan | Palu | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 106.119.460 | APBD | | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 111.425.433 |
| 01 02 02 2.03 01 | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Palu | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap Tahunan Pustu | 57.979.210 | APBD | | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap Tahunan Pustu | 60.878.171 |
| 01 02 02 2.03 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Palu | 1 Dokumen Komdat | 39.610.250 | APBD | | 1 Dokumen Komdat | 41.590.763 |
| 01 02 02 2.03 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan | Palu | 1 Paket (Jaringan Lantai 2) | 8.530.000 | APBD | | | 8.956.500 |
| 01 02 02 2.04 | Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota | Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan | Palu | 13 RS | 10.485.250 | APBD | | 13 RS | 11.009.513 |
| 01 02 02 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Palu | 13 RS | 4.985.150 | APBD | | 13 RS | 5.234.408 |
| 01 02 02 2.04 02 | Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang | Palu | 13 RS | 1.887.550 | APBD | | 13 RS | 1.981.928 |
| 01 02 02 2.04 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Palu | 13 RS | 3.612.550 | APBD | | 13 RS | 3.793.178 |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------------|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan | Palu | 100% | 149.389.000 | APBD | | 100% | 156.858.450 |
| 01 02 03 2.01 | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | Palu | 256 Sarana Praktek Swasta | 1.264.400 | APBD | | 256 Sarana Praktek Swasta | 1.327.620 |
| 01 02 03 2.01 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Palu | 2 Dokumen | 1.264.400 | APBD | | 2 Dokumen | 1.327.620 |
| 01 02 03 2.03 02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Palu | 100 | 1.224.800 | APBD | | 100 | 1.286.040 |
| 01 02 03 2.04 | Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Palu | 75 Nakes | 146.899.800 | APBD | | 100 Nakes | 154.244.790 |
| 01 02 03 2.04 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Palu | 75 Nakes | 146.899.800 | APBD | | 100 Nakes | 154.244.790 |
| 01 02 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | Palu | 100% | 410.670.300 | DAK BPOM, APBD | | 100% | 431.203.815 |
| 01 02 04 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT | Palu | 172 PIRT | 299.724.000 | DAK BPOM | | 265 PIRT | 314.710.200 |
| 01 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Palu | 1 Dokumen PIRT | 299.724.000 | DAK BPOM | | 1 Dokumen PIRT | 314.710.200 |
| 01 02 04 2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM | Palu | 1.348 TPM | 1.925.150 | APBD | | 1.225 TPM | 2.021.408 |
| 01 02 04 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Palu | 1 Dokumen | 1.925.150 | APBD | | 1 Dokumen | 2.021.408 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|--------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0102042.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan | Palu | 336 stiker | 1.869.150 | APBD | | 350 stiker | 1.962.608 |
| 0102042.0501 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Palu | 1 Dokumen | 1.869.150 | APBD | | 1 Dokumen | 1.962.608 |
| 0102042.06 | Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | Palu | 35 sarana PIRT | 107.152.000 | APBD | | 35 sarana PIRT | 112.509.600 |
| 0102042.0601 | Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Palu | 135 sarana PIRT | 107.152.000 | DAK BPOM | | 71482000 | 112.509.600 |
| 010205 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Palu | 100% | 2.739.127.050 | APBD | | 100% | 2.876.083.403 |
| 0102052.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota | Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan | Palu | 100% | 3.238.900 | APBD | | 100% | 3.400.845 |
| 0102052.0101 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Palu | 1 Dokumen | 3.238.900 | APBD | | 1 Dokumen | 3.400.845 |
| 0102052.02 | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS | Palu | 100% | 490.981.000 | APBD | | 100% | 515.530.050 |
| 0102052.0201 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Palu | 1 Dokumen | 490.981.000 | APBD | | 1 Dokumen | 515.530.050 |
| 0102052.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota | Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM | Palu | 100% | 2.244.907.150 | APBD | | 100% | 2.357.152.508 |
| 0102052.0301 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Palu | 1 Dokumen | 2.244.907.150 | APBD | | 1 Dokumen | 2.357.152.508 |
| | | | | | 120.139.103.224 | 126.146.058.385 | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja/kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.

4.1. Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan

Capaian program dan kegiatan berkaitan erat dengan indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palu selama 1 (satu) tahun anggaran kegiatan, yang diharapkan dapat mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, kegiatan dan sub kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Besaran target kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan selama Tahun 2023 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Rumus |
|-----------|---|--|---------------|--|
| 1. | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu | CC (59) | Hasil evaluasi Inspektorat Kota Palu |
| | | 2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu | B (66,50) | Hasil evaluasi Inspektorat Kota Palu |
| 2. | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat & Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia | 1. Angka Harapan Hidup | 71,60 Tahun | Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. |
| | | 2. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas | Baik (81,5) | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25 |
| | | 3. Prevalensi Balita Stunting | 16% | (Jumlah Balita stunting (pendek & sangat pendek) / (Jumlah Balita yang diukur menurut Umur atau Tinggi badan) * 100 |
| | | 4. Case Fatality Rate Covid-19 | 1,50% | (Jumlah kasus kematian Covid-19) / (Jumlah seluruh kasus Positif Covid-19) * 100 |
| | | 5. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) | 100% | (Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100 |
| | | 6. Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19 | 100% | (Jumlah Kasus Positif yang ditangani) dibagi (Jumlah Kasus COvid-19 yang ditemukan) * 100 |

Terkait perubahan indikator kinerja Pemerintah Kota Palu yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023, maka Indikator Kinerja Utama yang ada disetiap OPD juga disederhanakan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi terbaru.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan dan Target Kinerja Tahun 2023

| N o | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Rumus |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan | 1. Angka Harapan Hidup | 71,60 Tahun | Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. |
| | | 2. Prevalensi Balita Stunting | 16% | (Jumlah Balita stunting (pendek & sangat pendek) / (Jumlah Balita yang diukur menurut Umur atau Tinggi badan) * 100 |
| | | 3. Indeks Keluarga Sehat | 0,439% | (Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,800) / (Jumlah seluruh keluarga) |

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja kunci. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kunci Perubahan Tahun 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu

| NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2023 | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| 1. | Prevalensi Balita Gizi Buruk | 0,46 | |
| 2. | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | 0,9975 | |
| 3. | Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup | 16,5 | |
| 4. | Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup | 11,60 | |
| 5. | Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup | 180,31 | |
| 6. | Rasio Puskesmas per satuan Penduduk | 3,79 | |
| 7. | Rasio dokter per (1:2500 penduduk) | 60,33 | |
| 8. | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | 100% | |

| NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2023 | KET |
|-----|---|--------------------|-----|
| 9. | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 100% | |
| 10 | Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) | 100% | |
| 11. | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100% | |
| 12. | AFP (per 100.000 penduduk < 15 tahun) | 2/100.000 penduduk | |
| 13. | Cakupan balita Penumonia yang ditangani | 100% | |
| 14. | Cakupan Cakupan penemuan dan penanganan Penyakit DBD | 100% | |
| 15. | Cakupan penemuan penderita Diare | 100% | |
| 16. | Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 100% | |
| 17. | Cakupan kunjungan bayi | 100% | |
| 18. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 100% | |
| 19. | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam | 100% | |
| 20. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% | |
| 21. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100% | |
| 22. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | |
| 23 | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% | |
| 24. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | |
| 25. | Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 | |
| 26. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | |
| 27. | Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | |
| 28. | Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | |
| 29. | Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan | 100% | |
| 30. | Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100% | |
| 31. | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100% | |

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, tujuan program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Renja 2023 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu.

Renja sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Palu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan Kota Palu berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Palu Tahun 2023.
 - b. Dinas Kesehatan Kota Palu berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 dan RKPD Kota Palu Tahun 2023.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2023.

3) Rencana Tindak Lanjut.

Renja Dinas Kesehatan Kota Palu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palu selama 1 (satu) tahun kegiatan yaitu Tahun 2023 yang hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Palu. Semoga upaya Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih. Tentunya Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 ini dapat terlaksana dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu dan jajarannya, serta masyarakat.

Palu, Juli 2022

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



Ilham, S.Kep, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19651011 198802 1 002